

ABSTRAK
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LAPAS
(Studi dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar
Lampung)

Oleh
Halimatusakdiah

Kelebihan kapasitas yang dialami lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang semakin kompleks, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Tingginya jumlah penghuni yang berasal dari kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan berbasis pemenjaraan masih mendominasi, sehingga berdampak langsung pada keterbatasan daya tampung lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menegaskan urgensi penerapan rehabilitasi sebagai pendekatan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini merupakan Bagaimanakah penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung serta Apa saja faktor penghambat dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Narasumber dalam penelitian ini adalah Konselor Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung, Ketua Tim Rehabilitasi Sosial dan Konselor Adiksi Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, Ketua Tim Humas dan Informasi Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung lebih diarahkan pada kepentingan administratif, khususnya sebagai dasar pemberian program lanjutan berupa asimilasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat dalam rangka mempercepat reintegrasi narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya dampak positif yang tercermin dari penurunan jumlah narapidana perkara narkotika, meskipun secara statistik penurunan tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan. (2) Implementasi rehabilitasi tidak terlepas dari sejumlah permasalahan struktural dan

sosial yang menghambat dalam efektivitasnya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga medis dan psikolog, minimnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba. Kondisi ini menyebabkan penerapan rehabilitasi belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemulihan yang mandiri sekaligus sebagai strategi efektif dalam menekan tingkat overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Saran dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan rehabilitasi seharusnya tidak dibatasi pada orientasi administratif semata, melainkan dikembangkan sebagai proses pemulihan yang komprehensif yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya penguatan terhadap mutu program rehabilitasi dan pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan agar rehabilitasi dapat berfungsi secara efektif dalam menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus mendukung proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Perlunya peningkatan pada sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, dan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan rehabilitasi, disertai kegiatan dalam mengubah stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba. Sehingga pendekatan rehabilitatif berbasis kesehatan dan HAM perlu diperkuat agar program rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal dan berfungsi sebagai solusi nyata terhadap over kapasitas.

Kata Kunci: Penerapan Rehabilitasi, Penyalahguna Narkoba, Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LAPAS

**(Studi dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar
Lampung)**

Oleh

Halimatusakdiah

The excess capacity experienced by correctional institutions in Indonesia is an increasingly complex structural problem, especially in Narcotics Correctional Institutions. The high number of inmates from narcotics abuse cases shows that the imprisonment-based approach to punishment still dominates, so it has a direct impact on the limited capacity of correctional institutions. This condition emphasizes the urgency of implementing rehabilitation as an alternative approach that is not only oriented towards punishment, but also on the recovery of the perpetrator. The problem in this study is how to implement rehabilitation for narcotics abuse in reducing overcapacity in Class II A Narcotics Correctional Institution Bandar Lampung and what are the inhibiting factors in the implementation of rehabilitation for narcotics abuse in reducing overcapacity in Class II A Narcotics Correctional Institution Bandar Lampung.

The problem approach used in this study is by using normative juridical and sociological juridical approaches. The resource persons in this study are the Rehabilitation Counselor of the Bandar Lampung Narcotics Correctional Institution, the Head of the Social Rehabilitation Team and the Addiction Counselor of the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop, the Head of the Public Relations and Information Team of the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop, and the Academician of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study show that (1) The implementation of rehabilitation at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandar Lampung is more directed towards administrative interests, especially as the basis for providing advanced programs in the form of assimilation, conditional leave and loaded release in order to accelerate the reintegration of prisoners into community life. The implementation of the policy shows a positive impact reflected in the decrease in the number of inmates in narcotics cases, although statistically the decrease has not shown a significant change. (2) The implementation of rehabilitation is inseparable from a number of structural problems and These obstacles include limited human resources especially medical personnel and psychologists , lack of support for

facilities and infrastructure, weak coordination between agencies, and still strong social stigma against narcotics abusers. This condition causes the implementation of rehabilitation to not be able to function optimally as an independent recovery instrument as well as an effective strategy in reducing the level of overcapacity of correctional institutions.

The suggestion in this study is that the implementation of rehabilitation should not be limited to administrative orientation alone, but should be developed as a comprehensive recovery process that includes medical, psychological, and social aspects. To achieve this goal, it is necessary to strengthen the quality of rehabilitation programs and implement continuous evaluations so that rehabilitation can function effectively in reducing the overcapacity of correctional institutions while supporting the process of reintegration of prisoners into society. The need to improve human resources, provide adequate facilities, and coordination between agencies in the implementation of rehabilitation, accompanied by activities to change the social stigma against narcotics abusers. Therefore, the rehabilitation approach based on health and human rights needs to be strengthened so that rehabilitation programs can run more optimally and function as a real solution to overcapacity.

Keywords: Implementation of Rehabilitation, Narcotics Abuse, Overcapacity of Correctional Institution